

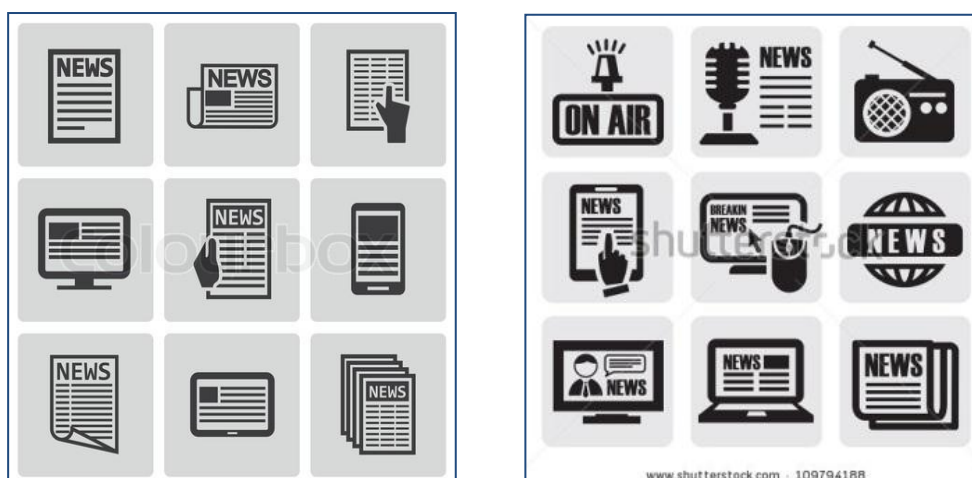


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Selasa, 24 May 2016



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2016**

Daftar Isi

1. RISET KOMODITAS TAK BERJALAN (*Media Online Kompas*)
2. RASIO UTANG PEMERINTAH NAIK (*Media Online Kompas*)
3. KEMENKEU OPTIMISTI BI LEBIH KONSERVATIF (*Media Online Kompas*)
4. KRISIS ANGKATAN KERJA BAYANGIN RI (*Media Online Media Indonesia*)
5. SBN SERI KHUSUS SIAP KUNCI DANA REPATRIASI (*Media Online Media Indonesia*)

Riset Komoditas Tak Berjalan

Industri Harus Impor Bahan Antara meski Bahan Baku dari Indonesia

JAKARTA, KOMPAS – Riset mengenai manfaat beberapa komoditas yang mulai hilang tidak berkembang di dalam negeri. Akibatnya, komoditas itu tidak diketahui nilai ekonominya. Bisnis komoditas itu malah dijalankan oleh perusahaan di luar negeri. Komoditas itu diekspor dan baru diimpor lagi ketika menjadi bahan antara.

Presiden Direktur PT Mustika Batu Tbk Putri K Wardani mengatakan, banyak bahan baku kosmetika berasal dari tanaman di Indonesia, tetapi pengolahannya menjadi bahan penolong terjadi di luar negeri. Setelah itu, pengusaha baru mengimpor dari beberapa negara.

Sejumlah petani di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya, ketika di-teliti petani lain dan Serein (2015), mengatakan, mereka tidak pernah mengetahui penggunaan komoditas pinang, kemayan, gambir, pala, esdara, dan komoditas lainnya. Mereka hanya mengetahui komoditas itu dijual ke pengumpul dan kemudian baru diekspor ke Singapura dan negara lainnya.

Meski demikian, menurut Putri, kini secara bertahap sudah mulai bertambah bahan baku dan bahan penolong lokal se-

(Sambungan dari halaman 1)

berangkat dari kebutuhan, bukan dari jenis tumbuhan. Kepala Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi LIPI Joesri S Rajaloe mengatakan, tidak semua budidaya dan pengembangan komoditas teralihan pasti diteliti LIPI.

Peneliti genetika tanaman kapur di Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) di Aceh Nauli, Sipangan Bolan, Simahungun, Cut Rizaldi Khalidina mengatakan, pihaknya telah meneliti tanaman itu dan berharap bisa berlanjuti.

"Banyak sekali material di dalam tanaman itu yang harus diteliti, tetapi diunggahnya masih minim," kata Cut. Tahun ini, anggaran penelitian kapur di lembaga penelitian itu hanya Rp 60 juta. Tanaman ini bisa digunakan untuk parfum dan obat.

Peneliti perdagangan kemeryan BP2LHK, Alfonsus Hari-anya, mengatakan, penelitiannya menunjukkan ada ketertutupan informasi dari pelaku usaha. Dengan, porsi margin tata niaga diperoleh eksportir sangat besar sehingga tidak bersedia untuk di-buka informasinya.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Henry Tesyas mengatakan, untuk mengembangkan tanaman pala, petani masih menggunakan cara tradisional. Hingga saat ini belum ada penelitian terkait rekayasa genetika pala untuk menilikkan

NILAI EKONOMI REMPAH-REMPAH

Komoditas	Ekspor (ton)	Nilai (ribu dollar AS)	Impor (ton)	Nilai (ribu dollar AS)
Asam Jawa	10.738	4.062	5.638	3.297
Kayu Manis	40.423	49.593	438	1.845
Pinang	216.539	154.939	302	326
Panili	278	5.267	52	498
Pala	12.949	141.021	58	115
Lada	47.908	346.975	417	3.783
Jaje	22.472	14.599	6.308	5.527
Kunyit	794	493	3	8

Keterangan: Data ekspor dan impor tahun 2012, sedangkan data dan nilai tahun 2015 dan 2016 merupakan angka estimasi.

IMPOR OBAT HERBAL

Komoditas	Volume (ton)	Nilai (ribu dollar AS)
Jaje	1.007	5.927
Tamulawak	249	475
Rempah-rempah lainnya	170	145
	634	796
	334	444

bagai substitusi impor. Kendala pengolahan bahan pendukung produksi tersebut biasanya disebabkan investasi awal yang cukup tinggi. Akan tetapi, rencana Kementerian Perindustrian memberikan insentif khusus kepada industri yang mempunyai tingkat kandungan dalam negeri 40-50 persen—yang bertahap akan terus dinaikkan—sangat baik dalam memaksa industri untuk terus mencari bahan substitusi impor. Untuk itu diperlukan riset yang memadai.

Meski demikian, riset terkait potensi manfaat suatu jenis tumbuhan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

(Sambungan ke hal 15 kol 4-7)

produksi dan memanfaatkan pala secara lebih ekonomis.

Penelitian tentang pala masih sebatas cara menjaga kualitas pada pasca panen. Banyak pala asal Maluku tidak berkualitas karena dijemur saja. Metode pengeringan pada umumnya masih mengandalkan sinar matahari atau pengasapan.

Selain itu, petani juga tidak mempunyai panduan dalam memilih anakan pala. Anakan pala terdiri dari dua macam, yakni jantan dan betina. Pala betina yang menghasilkan buah pada dan bunganya.

Dosen Pertanian Universitas Lampung, Rusdi Baisal, mengatakan, pemerintah perlu membantu petani dalam penyediaan bibit lada. "Jangan sampai kerusakan tanaman akibat pernakaliti terjadi kembali. Pemerintah harus memastikan bibit diambil kebun yang sehat. Pengawasan bibit menjadi hal utama juga ingin produksi meningkat. Untuk itulah, pemerintah perlu melakukan riset bibit dan manfaat pala," ujarnya.

Masalah dana

Secara umum, kendala penelitian itu ada pada masalah dana. Penelitian di Indonesia senantiasa dituangkan masalah klasik, yakni keclinya dana riset. Secara nasional, total belanja penelitian dan pengembangannya sekitar 0,09 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu membuat Indonesia di tingkat Asia Tenggara kalah dari Thailand

(0,85 persen PDB) dan Malaysia (di atas 1 persen PDB). Peneliti harus membuat prioritas agar anggaran kecil itu efektif.

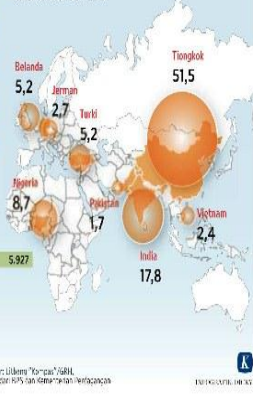
Menurut Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Benyamin, saat ini bantuan untuk pengembangan tanaman pinang memang tidak dialokasikan dalam anggaran. Terakhir, bantuan bibit pinang pernah diberikan pada 2012 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 10.000 bibit, tetapi selanjutnya tidak ada lagi.

Kepala Subbagian Program Dinas Perkebunan Sumatera Utara Otopan Sihombing mengatakan, sejak 2010 tidak ada lagi anggaran untuk pengembangan tanaman kemeryan. Pemerintah hanya fokus pada kelapa sarit, kopi, cokelat, karet, dan kelapa. Sebelumnya, APBD Provinsi Sumatera Utara menganggarkan sedikit untuk pembenihan tanaman di Tapanuli Utara seluas sekitar 5 hektar. "Tahun 2006 hingga 2010 ada penangan tanaman untuk 5 hektar atau sekitar 1.500 batang tanaman," kata Otopan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Benhur H Simamora, tahun ini, karena ada pemotongan dana alokasi khusus, anggaran konservasi tanaman kemeryan hanya muncul di dana alokasi umum. Pengembangan tanaman kemeryan hanya dilakukan di tiga kecamatan, yakni Pangaribuan, Pahae Jula, dan Adian Koting, seluas 15 hektar.

NEGERI ASAL IMPOR OBAT HERBAL (%)

Periode: Januari-Juni 2014



Sumber: Litbang "Formulasi" herbal oleh DRPIS dan GEMARMA/Perkebunan

RISET KOMODITAS TAK BERJALAN

Riset mengenai manfaat beberapa komoditas yang mulai hilang tidak berkembang di dalam negeri. Akibatnya, komoditas itu tidak diketahui nilai ekonominya. Bisnis komoditas itu malah dijalankan oleh perusahaan di luar negeri. Komoditas itu diekspor dan baru diimpor lagi ketika menjadi bahan antara dan kendala pengolahan bahan pendukung produksi tersebut biasanya disebabkan investasi awal yang cukup tinggi. Akan tetapi, rencana Kementerian Perindustrian memberikan insentif khusus kepada industri yang mempunyai tingkat kandungan dalam negeri 40-50 persen—yang bertahap akan terus dinaikkan—sangat baik dalam memaksa industri untuk terus mencari bahan substitusi impor. Untuk itu diperlukan riset yang memadai

Hashtag Berita :

- #StabilitasHargaPanganNasional
- #BadanUrusanLogistik
- #OperasiPasar
- #KementerianPerdagangan
- #PertumbuhanEkonomiNasional
- #DayaBeliMasyarakat



Suaraku komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

KOMPAS

Selasa

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

24 May 2016

Rasio Utang Pemerintah Naik

Menkeu: Ekspansi Pemerintah Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Akumulasi utang pemerintah pada akhir 2016 akan membengkak. Pada 2015, nilai utang itu sekitar 26,8 persen dari produk domestik bruto. Pada akhir tahun ini, Kementerian Keuangan memproyeksikan nilainya menjadi 27 persen dari produk domestik bruto.

Dalam statistik yang diterbitkan Bank Indonesia, rasio total utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2016 sebesar 36,47 persen. Total utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (23/5), menyampaikan, anggaran pemerintah perlu ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, utang ditarik, terutama untuk membiayai proyek pembangunan.

"Tahun lalu, kita tidak punya sumber pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas jatuh. Ekspor tumbuh negatif. Konsumsi ma-

syarakat tumbuh 5 persen. Tidak lebih, bahkan terancam berkurang. Investasi agak tersendat," tutur Bambang.

Saat sektor swasta dan rumah tangga masih lambat, lanjut Bambang, mau tak mau, pemerintah berada di depan untuk mendorong perekonomian. Caranya melalui pembangunan.

"Jadi, kita memang perlu anggaran defisit, hingga kita yakin ada sumber pertumbuhan sampai ekspor tumbuh positif, investasi tumbuh kuat, dan konsumsi masyarakat tumbuh stabil," kata Bambang.

Kendati membengkak, Bambang meyakinkan, utang Pemerintah Indonesia masih tergolong aman dan terkelola baik. Menurut dia, yang tak kalah penting, utang digunakan untuk kegiatan

POSISI UTANG DAN INDIKATOR UTANG LUAR NEGERI (JUTA DOLLAR AS)

	2012	2013	2014	2015 Desember	2016 Maret
1. Pemerintah dan Bank Sentral	126.119	123.548	129.736	142.659	151.312
2. Swasta	126.245	142.561	163.592	167.327	164.673
Total	252.364	266.109	293.328	309.987	315.985
Rasio terhadap PDB (persen)	27,41	29,13	32,95	35,98	36,47

Sumber: Bank Indonesia

INFOGRAFIK: DICKY

produktif, bukan konsumtif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. Sementara akumulasi utang pemerintah maksimal 60 persen PDB.

Akumulasi utang pemerintah per Maret 2016 sebesar Rp 3.263,52 triliun. Jumlah ini terdiri dari pinjaman Rp 750,16 tri-

liun dan surat berharga negara (SBN) Rp 2.513,36 triliun. Lima kreditor besar yang mendominasi pinjaman luar negeri adalah Bank Dunia, Pemerintah Jepang, Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Perancis, dan Pemerintah Jerman.

Batas aman

Dosen Universitas Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyanto-

ko, menyatakan, secara umum negara-negara dunia meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Indonesia masih konsisten di batas aman konvensional.

Prasetyantoko menekankan, hal paling penting, belanja negara efisien dan efektif serta benar-benar memberikan efek berganda. Dengan demikian, utang membantu meningkatkan kapasitas ekonomi domestik. (I.AS)

Akumulasi utang pemerintah pada akhir 2016 akan membengkak. Pada 2015, nilai utang itu sekitar 26,8 persen dari produk domestik bruto. Pada akhir tahun ini, Kementerian Keuangan memproyeksikan nilainya menjadi 27 persen dari produk domestik bruto. Dalam statistik yang diterbitkan Bank Indonesia, rasio total utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2016 sebesar 36,47 persen. Total utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta

Hashtag Berita :

#StabilitasEkonomiIndonesia

#KementerianKeuangan

#MoneterKeuanganNegara

#ProdukDometikBruto #UtangLuarNegeri #APBN #PaketKebijakanEkonomiNasional

Kemenkeu Optimistis, BI Lebih Konservatif

Dorong Pertumbuhan 0,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Keuangan memasang asumsi optimistis terhadap hasil program pengampunan pajak. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih konservatif. Hasil yang dimaksud mencakup nilai repatriasi modal dan penerimaan negara dari uang tebusan pemohon pengampunan.

Perbedaan pandangan dua lembaga itu terungkap dalam rapat kerja terbuka di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (23/5). Rapat formal perdana yang bersifat teknis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak ini dihadiri Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo. Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmadi Noor Supit memimpin rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu.

Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak dari uang tebusan tahun ini Rp 165 triliun. Adapun repatriasi dana yang benar-benar akan masuk ke sistem keuangan nasional mencapai Rp 1.000 triliun.

Asumsinya, aset bersih yang dideklarasikan Rp 3.500 triliun hingga Rp 4.000 triliun. Asumsi ini berdasarkan data potensi pajak yang dimiliki Kementerian Keuangan.

Bambang menyatakan, data itu diperoleh dari sumber resmi dan valid. Data menyebutkan, ada 6.519 warga negara Indonesia yang menempatkan aset setara Rp 13.300 triliun di luar negeri.

Angka tersebut merupakan data akumulasi 1995-2015. Dari cek acak, kata Bambang, umumnya aset tersebut tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

Adapun BI mengkaji berdasarkan dana ilegal yang diterbangkan dari dalam negeri ke luar negeri, hasil penelitian Global Financial Integrity (GFI). Mengacu GFI, ada Rp 3.147 triliun dana ilegal yang terbang ke luar negeri pada 2003-2015. Dana itu terdiri dari 60 persen aset hasil penghindaran pajak dan 10 persen hasil korupsi. Sementara 30 persen lainnya terkait kegiatan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia.

Dari aspek pidana, RUU tentang Pengampunan Pajak mengampuni pidana pajak. Karena itu, menurut Agus, hanya sekitar 60 persen dari total aset yang akan dilaporkan untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Dengan demikian, BI memproyeksikan tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan untuk tahun ini Rp 53,4 triliun atau tak sampai sepertiga proyeksi Kementerian Keuangan. Repatriasi modal diperkirakan Rp 560 triliun atau lebih dari separuh proyeksi Kementerian Keuangan.

Terhadap beda asumsi tersebut, Bambang dan Agus secara normatif di depan forum menyatakan wajar. Alasannya, basis asumsi yang digunakan berbeda.

Pertumbuhan

Dari aspek ekonomi makro, kajian BI menyebutkan, program pengampunan pajak akan menyumbang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan, masing-masing 0,3 persen. Sumbangan ini terutama dari dana repatriasi yang memperkuat likuiditas domestik.

Sumbangan terhadap inflasi juga akan terjadi pada tahun depan, yakni 0,3 persen. Sumbangan terhadap pertumbuhan kredit perbankan 2 persen pada tahun ini dan 4,2 persen tahun depan.

Dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 and 13th Asia Pacific Tax Forum, di Jakarta, kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, membicarakan pajak sama dengan membicarakan keseimbangan. Pajak yang terlalu tinggi akan merusak suasana investasi. Sementara pemberlakuan pajak yang terlalu ringan akan mempersulit negara membangun infrastruktur dan perbaikan sarana usaha yang dibutuhkan untuk menggenjot investasi. (LAS/NDY)

KEMENKEU OPTIMISTI BI LEBIH KONSERVATIF

Kementerian Keuangan memasang asumsi optimistis terhadap hasil program pengampunan pajak. Sebaliknya, Bank Indonesia lebih konservatif. Hasil yang dimaksud mencakup nilai repatriasi modal dan penerimaan negara dari uang tebusan pemohon pengampunan dan Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak dari uang tebusan tahun ini Rp 165 triliun. Adapun repatriasi dana yang benar-benar akan masuk ke sistem keuangan nasional mencapai Rp 1.000 triliun. Asumsinya, aset bersih yang dideklarasikan Rp 3.500 triliun hingga Rp 4.000 triliun. Asumsi ini berdasarkan data potensi pajak yang dimiliki Kementerian Keuangan

Hashtag Berita :

#KementerianKeuangan

#StabilitasEkonomiIndonesia

#BankIndonesia

#PaketKebijakanEkonomiNasional

#EkonomiGlobal

Selasa, 24 May 2016

Krisis Angkatan Kerja Bayangi RI

Pada 2040, RI berpotensi mengalami penuaan generasi yang bakal memunculkan risiko fiskal akibat menurunnya angkatan kerja.

IRENE MARTY

INDONESIA tidak boleh lengah meski saat ini masih menikmati bonus demografi. Tak sampai 25 tahun dari sekarang, Indonesia akan menghadapi masalah penuaan penduduk yang berpotensi kuat menyusutkan jumlah penduduk angkatan kerja.

Bank Dunia menyarankan pemerintah segera mempersiapkan strategi menghadapi masalah yang diperkirakan memuncak di 2040 tersebut. Jika antisipasinya terlambat, amat mungkin pemerintah akan dibom dengan lonjakan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan akibat penuaan penduduk.

"Risiko terbesar penuaan ialah risiko fiskal. Jika tidak ada sistem yang diubah, akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar," kata ekonom utama Bank Dunia Phillip O'Keefe pada Laporan Masalah Penuaan di Asia Timur dan Pasifik di Jakarta, kemarin.

Saat ini, penduduk lansia di Indonesia mencapai 18,78 juta jiwa. Sebanyak 2,8 juta jiwa di antara mereka dikategorikan miskin. Untuk membiayai penduduk kategori itu dan mencegah kemiskinan berkelanjutan, Kementerian Sosial memerlukan anggaran Rp6,72 triliun per tahun.

Phillip memaparkan strategi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi itu ialah membenahan sistem pensiun. Selain itu, perlu dicermati pula banyaknya usia senja yang bekerja di sektor informal yang memerlukan jaminan sosial terutama kesehatan.

Senada dengan Phillip, ahli kependudukan dari Universitas Indonesia Prijono Tjipthoherijanto mengungkapkan sistem penghitungan dana pensiun mesti diubah.

Menurutnya, pensiun berdasarkan *benefit* atau manfaat yang dapat menyebabkan uang negara habis diubah skemanya menjadi berdasarkan kontribusi atau dari pajak yang sudah diberikan.

Namun, ia tak terlalu yakin pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal muncul. "Pemerintah ini siap enggak hadapi, ada enggak pemerintah siapkan program kerja apa saja," tuturnya.

Ekonom CSIS Djisman Simandjuntak menyebut perlindungan tenaga kerja nonformal yang sekitar 70% dari seluruh tenaga kerja diperlukan untuk mengatasi akibat dari setopnya bonus demografi yang berimbas pada kemiskinan.

Akan tetapi, ia lebih menyoroti pentingnya teknologi untuk dimanfaatkan lebih maksimal. "Kita bergerak ke masyarakat granular. Teknologi akan memungkinkan bertindak lebih ekonomi saat ada implikasi penuaan."

Inefisiensi anggaran

Di tempat lain, Direktur Eksekutif IDEAS

Yusuf Wibisono menyebut kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan inefisiensi dan stagnasi dari postur anggaran pemerintah. "Anggaran mesti fokus untuk mengatasi kesenjangan, bukan diprioritaskan untuk meningkatkan belanja birokrasi," ungkapnya saat peluncuran buku *Indonesia Pro Poor Budget Review 2016* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Solusi yang ditawarkan Yusuf lebih difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, bukan dengan transfer pendapatan atau bantuan langsung tunai yang tidak menciptakan ekonomi inklusif.

Anggota DPR RI Komisi VIII Ledia Hanifah Amaliah mengatakan penanggulangan kemiskinan harus didukung kebijakan anggaran untuk kemandirian, kebijakan proteksi UMKRM, serta kepekaan dan kepedulian birokrasi. "Selain itu, masyarakat miskin perlu meningkatkan kemampuan literasi dan akses bank sebagai transaksi ekonomi," tuturnya. (Ant/E-1)

irene@mediaindonesia.com

Indonesia tidak boleh lengah meski saat ini masih menikmati bonus demografi. Tak sampai 25 tahun dari sekarang, Indonesia akan menghadapi masalah penuaan penduduk yang berpotensi kuat menyusutkan jumlah penduduk angkatan kerja. Bank Dunia menyarankan pemerintah segera mempersiapkan strategi menghadapi masalah yang diperkirakan memuncak di 2040 tersebut. Jika antisipasinya terlambat, amat mungkin pemerintah akan dibom dengan lonjakan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan akibat penuaan penduduk. Kemudian Pada 2040, RI berpotensi mengalami penuaan generasi yang bakal memunculkan risiko fiskal akibat menurunnya angkatan kerja

Hashtag Berita :

#KesempatanKerja

#StabilitasEkonomiIndonesia

#BonusDemografi

#PertumbuhanEkonomiNasional

#Inflasi

#PaketKebijakanEkonomiNasional

#KementerianKetenagaKerjaan #KebijakanFiskal

Selasa, 24 May 2016

SBN Seri Khusus Siap Kunci Dana Repatriasi

PEMERINTAH menyiapkan instrumen obligasi khusus untuk mengunci dana repatriasi pengampunan pajak. Penerbitan surat berharga negara (SBN) seri khusus berjangka waktu panjang disiapkan secara spesifik untuk menampung aset repatriasi hingga Rp100 triliun.

"Ya sementara ini Rp100 triliun khusus untuk SBN," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai menghadiri 13th Annual Asia-Pacific Tax Forum: International Conference on Tax, Investment, and Business di Kementerian Keuangan, kemarin.

Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan masih memfinalisasi sejumlah instrumen yang nantinya akan dipakai untuk merepatisasi aset pengampunan pajak. "Mekanismenya nanti juga melibatkan perbankan," ujar Bambang.

Di samping SBN, ada instrumen lain untuk menyerap dana pengampunan pajak.

Perbankan dilibatkan sebab di samping SBN, ada instrumen lain untuk menyerap dana pengampunan pajak.

"Bank itu yang menjadi

pintu masuknya, dia yang nanti kembangkan apakah itu ke saham, SBN, apa instrumen lain. Jadi, bank sebagai pintu masuknya, di samping instrumen banknya sendiri. Mereka (yang mengajukan pengampunan pajak) cuma tinggal bayar uang tebus," kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Strategis dan Portfolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan pemerintah menyiapkan SBN seri khusus yang memisahkan dana repatriasi dengan dana sumber investor lain. "Prinsipnya, kita buat satu pot khusus untuk menandai uang hasil repatriasi *tax amnesty* supaya dana itu bisa dicatat," ujar dia.

Ia bahkan mengatakan pemerintah mengantisipasi SBN seri khusus itu mampu menyerap sampai Rp200 triliun dana repatriasi. "Kalau melebihi itu, sisanya lewat instrumen lain, *gate* lain."

Pelaku pasar modal menyambut baik potensi dana repatriasi pajak dari *tax amnesty*. "Tentu ada peluang bagi pasar modal karena sebagian masuk ke perbankan, sektor riil, dan pasar modal," ungkap Direktur Emco Asset Management Hans Kwee.

Menurutnya, ada beberapa produk yang potensial menyerap dana itu, umpama reksa dana pendapatan tetap yang memiliki insentif pajak. Hans mengatakan pajak reksa dana tersebut hanya 5% berbeda dengan produk lain seperti investasi langsung yang memiliki pajak 15%. (Jay/Ire/E-2)

SBN SERI KHUSUS SIAP KUNCI DANA REPATRIASI

Pemerintah menyiapkan instrumen obligasi khusus untuk mengunci dana repatriasi pengampunan pajak. Penerbitan surat berharga negara (SBN) seri khusus berjangka waktu panjang disiapkan secara spesifik untuk menampung aset repatriasi hingga Rp 100 triliun. Di samping SBN, ada instrumen lain untuk menyerap dana pengampunan pajak

Hashtag Berita :

#PertumbuhanEkonomiNasional
#SuratBerhargaNegara
#PaketKebijakanEkonomiNaional
#KementerianKeuangan
#UtangLuarNegeri #Perpajakan